

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Adya Barata, Atep, 2011, *Panduan Lengkap Pajak Penghasilan*, Visimedia, Jakarta.
- Ayza, Bustamar, 2017, *Hukum Pajak Indonesia*, Kencana, Depok.
- Amiruddin dan Asikin, Zainal, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Brotodiharjo, Santoso, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, Refika Aditama, Bandung.
- Brotodiharjo, Santoso, 1984, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, Eresco, Jakarta.
- Dyah Ochtorina Susanti dan Efendi, A'an, 2014, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Harnanto, 1982, *Akuntansi Keuangan Intermediate 1*, Liberty, Yogyakarta
- Hutomo, Sigit, 2009, *Pajak Penghasilan Konsep dan Aplikasi, Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Beserta Peraturan Pelaksanaannya*, Penerbit Universitas Atma Jaya, Yogyakarta.
- Ikatan Akuntan Indonesia, 2004, *Standar Akuntansi Keuangan Per 1 Oktober 2004*, Salemba Empat, Jakarta.
- Ikatan Akuntan Indonesia, 2016, *Standar Akuntansi Keuangan Efektif Per Januari 2017*, Ikatan Akuntansi Indonesia, Jakarta.
- Judisseno, Rimsky K., 2004, *Perpajakan: Edisi Revisi*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Mangkoesebroto Algifari, Guritno, 1998, *Teori Ekonomi Makro*, Bagian Penerbitan STIE YKPN, Yogyakarta.
- Mardiasmo, 2003, *Perpajakan Edisi Revisi*, Penerbit Andi, Yogyakarta.
- Mirrlees *et.al.*, 2011, *Tax by Design*, Oxford University Press, Oxford.
- Muhammad, Abdulkadir, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

- Mukti Fajar N.D. dan Achmad, Yulianto, 2015, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Muljono, Djoko, *Panduan Brevet Pajak Pajak Penghasilan*, Penerbit Andi, Yogyakarta
- Muljono, Djoko, *Panduan Brevet Pajak Akuntansi Pajak dan Ketentuan Umum Perpajakan*, Penerbit Andi, Yogyakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2005, *Penelitian Hukum*, Pranada Media Grup, Jakarta.
- Otoritas Jasa Keuangan, 2015, *Laporan Triwulanan IV-2015*, Laporan Triwulan, Otoritas Jasa Keuangan, Jakarta.
- Otoritas Jasa Keuangan, 2016, *Laporan Triwulanan I-2016*, Laporan Triwulan, Otoritas Jasa Keuangan, Jakarta.
- Pudyatmoko, Y.Sri, “Pengantar Hukum Pajak Edisi Terbaru”, dalam Bustamar Ayza, 2017, *Hukum Pajak Indonesia*, Kencana, Depok.
- Pusat Bahasa, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Gramedia, Jakarta.
- Supramono dan Woro Damayanti, Theresia, 2010, *Perpajakan Indonesia*, Andi Offset, Yogyakarta.
- Soekanto, Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta.
- Soemitro, Rochmat, 1990, *Asas dan Dasar Perpajakan*, Eresco, Bandung.
- Soerjono Soekanto dan Mamudji, Sri, 1995, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Suandi, Erly, 2011, *Hukum Pajak*, Salemba Empat, Jakarta.
- Warfield, Kieso Wiegandt, 2014, *Intermediate Accounting*, Wiley, Wisconsin.

JURNAL

- Mansfield, Charles Y., "Tax Administration in Developing Countries: An Economic Perspective", *Staff Paper (International Monetary Fund)*, Vol 35, No. 1, Maret 1998.
- Mercy, *et al.*, Evaluasi Pencatatan Pelaporan Dana Pensiun pada Dana Pensiun Pemberi Kerja (Studi Kasus Pada PT. PLN Wilayah Suluttenggo), *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, Vol. 15, No. 3, April 2015.
- OECD, 2008, *OECD Private Pensions Outlook*, OECD Publishing.
- Radjijo, "Pemungutan Pajak Penghasilan Dengan Sistem Self Assesment Bagi Wajib Pajak Badan", *Jurnal Ekonomi dan Kewirausahaan*, Vol. 7, No. 1, April 2007.
- Saefuloh, *et al.*, "Kebijakan Pengelolaan Dana Pensiun Sektor Korporasi", *Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik*, Vol. 6, No. 1, Juni 2015.
- Watung *et al.*, "Analisis Penerapan PSAK24 Mengenai Imbalan Kerja pada PT. Bank Maybank Indonesia TBK KCP Kotamabagu", *Jurnal EMBA*, Vol.4, No.4, Desember 2016.

SKRIPSI

- Leli Mulyani, 2009, *Analisis Pencadangan Biaya Pesangon di PT. PGN (Persero) Tbk.*, Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, Jakarta.

ARTIKEL INTERNET

- Asosiasi Dana Pensiun Lembaga Keuangan, "Pedoman Penyelenggaraan dan Pengelolaan Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) Program Pensiun untuk Kompensasi Pesangon (PPUKP)", <http://www.dayamandiri.co.id/images/upload/File/dplk-ppukp-pedoman-final-21092013.pdf>, diakses pada 24 April 2018.
- Bisnis Indonesia, "Manfaat Lain Dana Pensiun: Pajak Segera Diputuskan", diakses dari <http://m.bisnis.com/kalimantan/read/20171024/444/702322/manfaat-lain-dana-pensiun-pajak-segera-diputuskan>, pada 12 Mei 2018.
- Detik Finance, "Dari 50 Juta Tenaga Kerja RI, Baru 13.5 Juta yang Punya Dana Pensiun", <https://finance.detik.com/moneter/d->

DPLK Indo Life, “Program Pensiun Untuk Kompensasi Pesangon”, diakses dari <http://www.dplkindolife.com/Read/Detail/ppukp>, pada 19 Januari 2018.

DPLK Jiwasraya, “Program Pensiun Iuran Pasti”, diakses dari <https://dplk.jiwasraya.co.id/main/produk/Program-Pensiun-Iuran-Pasti>, pada 22 April 2018.

DPLK Jiwasraya, “Program Pensiun Kompensasi Pesangon”, diakses dari <https://dplk.jiwasraya.co.id/main/produk/Program-Pensiun-Untuk-Kompensasi-Pesangon>, pada 19 Desember 2017.

Fuady, Wachid, “Hubungan Investasi dan Pajak dengan Kesenjangan Pendapatan dan Pertumbuhan Ekonomi”, <http://ejurnal.stiedharmaputra-smg.ac.id/index.php/DE/article/download/166/144>, pada 26 April 2018.

Hukum Online, “Berkembangnya Alasan-Alasan PHK dalam Praktik”, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol19045/berkembangnya-alasan-alasan-phk-dalam-praktik>, diakses 21 April 2018.

Ikatan Akuntan Indonesia, “Exposure Draft Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 24 (Revisi 2010)”, diakses dari <https://staff.blog.ui.ac.id/martani/files/2011/04/PSAK-24-Imbalan-Kerja.pdf>, pada 26 April 2018..

Jiwasraya, “Anuitas Ideal”, diakses dari <https://jiwasraya.co.id/?q=id/product/anuitas/anuitas-ideal>, pada 4 Maret 2017

Manulife, “Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK)”, diakses dari <https://www.manulife-indonesia.com/Assets/Contents/GroupBenefits/DplkId/FA%20DPLK%202803.pdf>, pada 22 April 2018.

Otoritas Jasa Keuangan, “Sosialisasi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/POJK.05/2017 tentang Iuran, Manfaat Pensiun, dan Manfaat Lain yang diselenggarakan oleh Dana Pensiun, oleh Direktorat Pengaturan, Penelitian, dan Pengembangan INKB, Jakarta, 22 Maret 2017” diakses dari <http://dayamandiri.co.id/konsultant-aktuarial/images/upload/File/Tayangan-Sosialisasi-POJK-05-2017.pdf> pada 26 April 2018.

Universitas Gadjah Mada, 2018 | Diunduh dari <http://etd.repository.ugm.ac.id/>
Ratna Satiti, Novita, “Dana Pensiun sebagai Lembaga Penguat Perekonomian Indonesia”, https://www.researchgate.net/profile/Novita_Satiti/publication/317578303_Penguatan_Industri_Kuangan_di_Indonesia_1_8_DANA_PENSIUN_SEBAGAI_LEMBAGA_PENGUAT_PEREKONMIAN_INDONESIA/links/5940d62f0f7e9ba171b284dc/Penguatan-Industri-Kuangan-di-Indonesia-1-8-DANA-PENSIUN-SEBAGAI-LEMBAGA-PENGUAT-PEREKONMIAN-INDONESIA.pdf, diakses pada 16 Juli 2018 hlm. 8

Remi Furqan, “Dana Pensiun”, diakses dari <https://remifurqan.com/dana-pensiun/>, pada 26 Desember 2017.

Rintonga, Rizali, “Pajak dan Pertumbuhan Ekonomi”, diakses dari <http://perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/83425-Pajak%20dan%20pertumbuhan.pdf>, pada 26 April 2018.

The Law Dictionary, “What is Lump Sum Payment?”, <https://thelawdictionary.org/lump-sum-payment/>, diakses pada 22 April 2018.

The World Bank, “Membuka Potensi Sumber Daya Keuangan Dalam Negeri Indonesia : Peran Lembaga Keuangan Non-Bank”, http://siteresources.worldbank.org/INTINDONESIA/Resources/226271-1176706430507/3681211-1192700911022/NBFI_bhs.pdf, diakses pada 17 Juli 2018, hlm. v.

Widya Presisi Solusi, “Mengantisipasi Kewajiban Pesangon/Pensiun dengan mengikuti Program Pensiun untuk Kompensasi Pesangon (PPUKP) untuk mendapatkan manfaat penghematan pajak”, diakses dari <http://www.widyapresisisolusi.com/Sections/NewsDetail.aspx?id=4d4a0fe3-2a67-44f6-87d6-2066fe3d009c>, pada 27 November 2017.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN INSTRUMEN INTERNASIONAL

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (PPh) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.

Perlakuan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Program Pensiun untuk Kompensasi Pesangon (PPUKP) Pasca Diterbitkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 5/POJK/2017 Dikaitkan dengan Syarat Ekonomi Pemungutan Pajak
AYU TIKA PRAVINDIAS, Dyah Ayu Ambarwati, S.H., M.H.
Universitas Gadjah Mada, 2018 | Diunduh dari <http://etd.repository.ugm.ac.id/>
Undang-Undang Nomor 11 tahun 1992 Tentang Dana Pensiun.

Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2009 tentang Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Penghasilan Berupa Uang Pesangon, Uang Manfaat Pensiun, Tunjangan Hari Tua, dan Jaminan Hari Tua Yang Dibayarkan Sekaligus

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 5/POJK/2017 tentang Iuran, Manfaat Pensiun dan Manfaat Lain yang Diselenggarakan oleh Dana Pensiun.

Keputusan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor Kep-150/Men/2000 Tentang Penyelesaian Pemutusan Hubungan Kerja dan Penetapan Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja dan Ganti Kerugian di Perusahaan.

DOKUMEN LAINNYA

Nota Dinas Direktur Pengaturan, Penelitian, dan Pengembangan IKNB Nomor ND-182/NB.112/2018 tertanggal 14 Mei 2018.